

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ekonomi Makro**

Ekonomi makro berasal dari kata Yunani yaitu *makro* yang artinya “besar”. Dalam skala ekonomi, sesuatu yang besar artinya bagian-bagian ekonomi yang besar, seperti suku bunga, pajak, dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.<sup>27</sup> Faktor-faktor ekonomi secara luas seperti inflasi atau pengaruh kenaikan harga pada perekonomian skala besar akan dibahas dalam ekonomi makro. Fokus ekonomi makro juga pada laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang mempresentasikan jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian negara.<sup>28</sup> Menurut Krugman:

Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Ini berarti adanya keterkaitan berbagai industri, pasar, tingkat pengangguran, inflasi, dan keluaran ekonomi umum dari seluruh perekonomian, seperti yang terjadi di suatu negara atau dunia secara keseluruhan.<sup>29</sup>

Menurut Bondarenko, “ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku perekonomian nasional atau daerah secara keseluruhan.” Menurut O’Sullivan:

Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berurusan dengan kinerja, struktur, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi

---

<sup>27</sup> Asnah dan Dyanasari, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 10.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 7.

secara keseluruhan, dan hal ini termasuk dalam ekonomi regional, nasional, dan global.<sup>30</sup>

Landasan syariah mengenai kegiatan ekonomi terdapat pada Q.S. An-Nahl:

14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

*Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.*

Makro ekonomi mempelajari isu-isu ekonomi utama berikut:

1. Tingkat pemanfaatan beragam sumber daya kegiatan ekonomi. Jika semua sumber daya digunakan, situasi ini disebut kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, jika masih terdapat sumber daya yang belum digunakan atau dimanfaatkan, berarti perekonomian tersebut setengah menganggur atau belum dalam posisi kesempatan kerja penuh.
2. Derajat stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas sektor moneter. Jika nilai suatu mata uang cenderung menurun terhitung dalam jangka waktu yang lama, berarti sedang terjadi inflasi. Apabila sebaliknya, maka disebut deflasi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>31</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 15.

Berikut perbedaan bidang kajian antara ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah.<sup>32</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bidang Kajian antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro**

No	Bidang Kajian	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
1	Sasaran analisis	Para konsumen suatu industri atau perusahaan, maupun dalam suatu pasar.	Sifatnya lebih global atau menyeluruh, yaitu tindakan keseluruhan konsumen.
2	Pilihan analisis	a. Menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya. b. Mencapai kepuasan maksimum.	a. Permintaan dan penawaran menentukan kegiatan ekonomi. b. Masalah utama setiap perekonomian c. Kebijakan dan campur tangan pemerintah.
3	Proses penentuan harga	Ditujukan pada satu industri dan industri lain dalam keadaan tertentu ( <i>ceteris paribus</i> ).	Mengabaikan perubahan harga relatif antar industri yang berbeda.
4	Total pendapatan	Pendapatan semua konsumen diasumsikan tertentu dan cara alokasinya ke barang yang ada.	Tingkat pendapatan atau pengeluaran agregat adalah variabel utama yang dipelajari.

Permasalahan kebijakan ekonomi makro diantaranya:

1. Masalah Jangka Pendek

Terdiri dari masalah stabilisasi seperti inflasi, ketimpangan neraca pembayaran, dan pengangguran.

2. Masalah Jangka Panjang

Terdiri dari masalah pertumbuhan, meliputi pertambahan kapasitas produksi, pertumbuhan penduduk, dan ketersediaan dana investasi.

Diantara variabel-variabel ekonomi agregatif yang sering menjadi persoalan ekonomi makro antara lain:

<sup>32</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, hal. 3.

1. Tingkat pendapatan nasional.
2. Tingkat kesempatan kerja.
3. *Saving*.
4. Investasi.
5. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
6. Tingkat bunga.
7. Neraca pembayaran.
8. Tingkat harga.
9. Jumlah uang yang beredar.
10. Utang pemerintah.<sup>33</sup>

Kebijakan ekonomi makro terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya:

1. Kebijakan fiskal merupakan cara pemerintah melakukan perubahan dalam bidang penganggaran dan perpajakan guna mempengaruhi jumlah pengeluaran yang digunakan dalam perekonomian secara keseluruhan.
2. Kebijakan moneter merupakan istilah yang digunakan oleh pemerintah (Bank Sentral, atau BI) guna mempengaruhi jumlah dana yang tersedia dalam suatu perekonomian atau guna mengubah tingkat bunga yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah agregat.
3. Kebijakan sisi penawaran, memiliki tujuan guna meningkatkan efektivitas kegiatan perusahaan sehingga dapat menyediakan barang dengan harga yang lebih murah namun berkualitas baik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, hal. 17.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 19.

Ilmu ekonomi makro dalam Islam mengacu pada ilmu yang didalamnya banyak pokok bahasan mengenai masalah kebijakan ekonomi makro yang berupa pengelolaan dan pengolahan menurut ajaran Islam. Menurut Umar Chapra, “ekonomi makro Islam adalah ilmu dedikasi untuk mewujudkan kesenangan manusia dengan mengalokasikan sumber daya yang lebih sedikit.” Ini mengacu pada tidak adanya kebebasan pribadi atau perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan, dan proses pengajaran Islam tanpa ketimpangan lingkungan.<sup>35</sup> Dalam menelaah fiqh ekonomi makro Islam terbatas pada dua hal, yaitu *fiqh* riba dan *fiqh* zakat. Kedua hal tersebut merupakan tolak ukur yang biasa digunakan pada pembahasan masalah-masalah ekonomi makro Islam.<sup>36</sup>

## **B. *Gross Domestic Product (GDP)***

Jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu biasanya dalam satu tahun disebut dengan pendapatan nasional. Menurut Sukirno, “pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara.”<sup>37</sup> Pendapatan nasional dapat dikatakan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara tertentu. Huruf P dan N memiliki arti yang berbeda, dimana pendapatan nasional berarti jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai faktor

---

<sup>35</sup> Hendri Hermawan Adinugroho, dkk., *Ekonomi Makro Islam*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hal. 3.

<sup>36</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 13.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 196.

produksi yang dipakai guna menghasilkan barang dan jasa pada tahun tertentu.<sup>38</sup>

Faktor yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasional bisa dilihat dari berbagai hal, diantaranya:

1. Permintaan dan Penawaran Agregat

Relasi atau hubungan antara seluruh permintaan barang dan jasa berdasarkan tingkatan harga ditunjukkan oleh jumlah permintaan agregat. Permintaan agregat merupakan daftar barang dan jasa yang dibeli oleh suatu sektor ekonomi dalam tingkat harga yang berbeda-beda. Sedangkan penawaran agregat menggambarkan relasi seluruh penawaran barang serta jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam tingkatan harga tertentu.<sup>39</sup>

2. Konsumsi dan Tabungan

Jumlah pengeluaran suatu perekonomian guna memperoleh barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) disebut konsumsi. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi.

3. Investasi

Pengeluaran investasi menjadi salah satu komponen penting dari total pengeluaran.<sup>40</sup>

Pendapatan nasional dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah cara produksi atau yang biasa disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

---

<sup>38</sup> Kumaidi, dkk., *Solusi Masalah Ekonomi Makro Perspektif Syariah*, (Ponorogo: Wade Group, 2019), hal. 13.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 20.

Menurut Mankiw “*Gross Domestic Product* atau disebut juga dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode.”<sup>41</sup>

GDP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dan populasi, berarti orang-orang yang berdomisili di suatu negara, tanpa memandang kebangsaan.<sup>42</sup> Menurut Manurung, “GDP adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (beralokasi) dalam perekonomian tersebut.” Pendapat ini sejalan dengan Case dan Fair yang menyebutkan, “*The total market value of all final goods and services produced within a given period, by factors of production located within a country.*”<sup>43</sup>

Pendapatan nasional dihitung menggunakan metode produksi (PDB) dengan menjumlahkan nilai tambah bruto seluruh sektor produktif. Konsep nilai tambah digunakan untuk menghindari penghitungan ganda. Misalnya, memasukkan harga penuh sepotong pakaian dalam perhitungan pendapatan nasional namun mengecualikan kain, kapas atau benang dari perhitungan pendapatan nasional.

Komponen seperti kain, benang atau kapas tergolong produk antara, artinya tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Oleh karena itu, hanya barang jadi yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan

---

<sup>41</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, hal. 196.

<sup>42</sup> Husna Ni'matul Ulya, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional dan Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hal. 7.

<sup>43</sup> Dikson Silitonga, “*Pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Pada Periode 2010-2020*”. Vol. 24 No. 1, 2021. Hal. 112.

nasional. Perhitungan PDB di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada, yang dibagi menjadi sebelas sektor menurut ISIC (*International Standard Industrial Classification*), antara lain:

1. Sektor produksi pertambangan dan penggalian.
2. Sektor produksi pertanian.<sup>44</sup>
3. Sektor produksi bangunan.
4. Sektor produksi sewa rumah.
5. Sektor produksi air minum, gas, dan listrik.
6. Sektor industri manufaktur.
7. Sektor produksi pemerintahan dan pertahanan.
8. Sektor produksi restoran, hotel, dan perdagangan.
9. Sektor produksi komunikasi dan transportasi.
10. Sektor produksi bank serta lembaga keuangan lainnya.
11. Sektor produksi jasa lainnya.<sup>45</sup>

Hasil produksi untuk masing-masing bidang usaha ini telah dijumlahkan selama satu tahun terakhir dan dikalikan dengan harga satuan masing-masing. Jadi rumusnya:<sup>46</sup>

$$Y=(Q_1.P_1)+(Q_2.Q_2)+\dots(Q_n.P_n)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto).

Q = Jumlah barang.

P = Harga barang.

---

<sup>44</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, hal. 22.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>46</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, hal. 198.

### C. Inflasi

Inflasi merupakan tanda yang menggambarkan kenaikan berkelanjutan di tingkat harga umum. Dari pengertian ini, jika hanya kenaikan harga sementara, tidak bisa dikatakan inflasi. Sedangkan menurut Sukirno “inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.” Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit.<sup>47</sup> Menurut Raharja dan Manurung, “inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.”<sup>48</sup>

Menurut definisi, inflasi adalah kenaikan harga yang umum dan berkelanjutan. Inflasi dianggap sebagai masalah karena berhubungan dengan daya beli masyarakat dalam suatu negara. Apabila harga umumnya naik (inflasi) dan pendapatan per kapita tidak mengikuti, daya beli masyarakat akan berkurang. Jika daya beli menurun, dapat dikatakan negara tersebut semakin miskin. Jika inflasi tinggi, suku bunga bank, khususnya suku bunga kredit, akan naik. Jadi ini sulit bagi semua orang, baik itu produsen atau konsumen. Jika ini terus berlanjut, orang akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.<sup>49</sup>

Penyebab terjadinya inflasi menurut Sukirno dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

---

<sup>47</sup> Faizin, *Ekonomi Makro Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hal. 91.

<sup>48</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, hal. 109.

<sup>49</sup> Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Swagati Press, 2010), hal. 2.

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini sering terjadi pada saat perekonomian sedang berkembang pesat.
2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini ada pada saat perekonomian sedang berkembang pesat disertai dengan penurunan tingkat pengangguran.
3. Inflasi impor, kenaikan harga barang-barang impor yang memiliki peran utama dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan menjadi penyebab adanya inflasi ini.<sup>50</sup>

*Rate of inflation* merupakan rumus yang digunakan untuk mengukur inflasi.

Berikut rumusnya:

$$\text{Rate of inflation} = \frac{\text{tingkat harga } t - \text{tingkat harga } t - 1}{\text{tingkat harga } t - 1} \times 100$$

Menurut Paul Samuelson, tingkat keparahan inflasi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Moderate Inflation* (Inflasi Satu Digit)

Inflasi ini ditandai dengan adanya kenaikan harga yang sangat lambat. Pada saat terjadinya *moderate inflation*, masyarakat masih ingin memegang uang, dan menempatkan kekayaannya dalam wujud uang daripada aset fisik.<sup>51</sup>

2. *Gallop ing Inflation*

Inflasi ini terjadi pada tingkat 20% hingga 200% per tahun. Pada tingkat ini, orang hanya ingin memegang uang selama mereka membutuhkannya,

---

<sup>50</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, hal. 110.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 111.

sedangkan kekayaan diwujudkan dalam bentuk aset fisik seperti tanah, rumah, dan lain-lain.

### 3. *Hyperinflation*

Tingkat inflasi ini sangat tinggi, yakni jutaan hingga triliunan persen.<sup>52</sup>

Penyebab munculnya inflasi diantaranya:

#### 1. Tekanan Dari Sisi *Supply* (*Cost Push Inflation*)

Berbagai faktor yang mendorong *cost push inflation* antara lain depresiasi nilai tukar, kenaikan harga barang oleh pemerintah, bencana alam, serta guncangan pasokan negatif dari distribusi. Faktor lain penyebab adanya tekanan dari sisi *supply* adalah adanya inflasi luar negeri, utamanya negara-negara mitra dagang.

#### 2. Tekanan Dari Sisi Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Yang berkontribusi terhadap inflasi tarikan permintaan adalah naiknya permintaan barang dan jasa relatif dengan ketersediaannya.

#### 3. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*

*Natural inflation* yaitu inflasi yang tidak dapat dicegah manusia dan terjadi karena sebab-sebab alamiah. Inflasi *human error* yakni inflasi yang terjadi disebabkan kelalaian manusia.

#### 4. *Spiralling Inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh inflasi yang terjadi sebelum-sebelumnya.<sup>53</sup>

#### 5. *Imported Inflation*

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 112.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 113

Inflasi impor adalah inflasi yang dialami oleh suatu negara dan dialami pula oleh negara lain. Inflasi ini terjadi dikarenakan negara harus menjadi penentu harga di pasar internasional.

Taqiuddin Ahmad Ibn al Maqrizi, salah seorang murid Ibn Khaldun, membagi inflasi menjadi dua kategori, *natural inflation* dan *human error inflation*.<sup>54</sup>

#### 1. *Natural Inflation*

Inflasi ini terjadi karena sebab alamiah yang ditimbulkan oleh penurunan penawaran agregat atau peningkatan permintaan agregat, yang sulit dikendalikan oleh masyarakat (dalam hal pencegahan).

$$MV = PT = Y$$

Dimana:

M = Jumlah uang yang beredar.

V = Kecepatan peredaran uang.

P = Tingkat harga.

T = Jumlah barang dan jasa (Q).

Y = Tingkat pendapatan nasional (GDP).

Dari rumus di atas *natural inflation* didefinisikan:

- a. Gangguan dalam jumlah (T) barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Misal, jika T berkurang sementara M dan V tetap, hasilnya adalah P meningkat.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 114.

- b. Peningkatan daya beli riil masyarakat, misal nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor, maka terjadi sesuatu pada impor uang bersih yang menyebabkan M naik, jadi jika V dan T tetap, P meningkat.<sup>55</sup>

## 2. *Human Error Inflation*

*Human error inflation* adalah inflasi yang dikarenakan kelalaian manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan pada Q.S. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Adapun beberapa penyebabnya diantaranya:

- a. Penyelewengan dana (korupsi) dan administrasi yang kurang baik (*corruption and bad administration*).
- b. Pajak yang terlalu berlebihan (*excessive tax*).
- c. Pencetakan uang yang bertujuan untuk mengambil laba yang lebih (*excessive seignorage*).<sup>56</sup>

## D. Nilai Tukar (Kurs)

Menurut Mankiw, “nilai tukar adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk melakukan perdagangan.” Menurut Nopirin,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 115.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 118.

“nilai tukar adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut.” Sedangkan menurut Salvator, “nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.”<sup>57</sup> Kenaikan nilai tukar akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha pembiayaan pada bank, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, sehingga bank akan menghadapi risiko kredit.<sup>58</sup>

Nilai tukar (kurs) mencerminkan stabilitas ekonomi suatu negara. Nilai tukar yang lebih kuat menunjukkan bahwa perekonomian dalam kondisi yang baik. Nilai tukar mata uang di suatu negara digolongkan menjadi dua, yakni nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Harga relatif mata uang dua negara disebut dengan nilai tukar nominal. Misal, 1 USD senilai dengan Rp9.500 di pasar mata uang. Sedangkan harga relatif barang antar kedua negara disebut dengan nilai tukar riil. Nilai tukar riil menunjukkan tingkat di mana pelaku ekonomi dapat menukar barang dari satu negara dengan barang dari negara lain. Nilai tukar riil dan nilai tukar nominal dapat dirumuskan sebagai berikut.<sup>59</sup>

$$REER = ER \times \frac{FP}{DP}$$

Dimana:

---

<sup>57</sup> Samsul Arifin dan Shany Mayasya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat”. Vol. 8 No. 1, 2018. Hal. 84.

<sup>58</sup> Sherly Yolanda dan Ariusni, “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).” Vol. 1 No. 3, 2019. Hal. 836.

<sup>59</sup> Ari Mulianta Ginting, “Pengaruh Nilai Tukar terhadap Ekspor Indonesia.” Vol. 7 No. 1, 2013. Hal. 3.

- REER : *Real Effective Exchange Rate* (nilai tukar riil).
- ER : *Exchange Rate* nominal yang dapat dinyatakan dalam *direct term* (dalam rupiah/1 dollar) maupun *indirect term* (dollar/1 rupiah).
- FP : *Foreign Price* Indeks harga mitra dagang (luar negeri).
- DP : *Domestic Price* (indeks harga domestik).

Menurut Sukirno, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kurs, sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Berubahnya selera masyarakat akan menyebabkan perubahan pada pola konsumsi mereka terhadap barang dalam dan luar negeri. Peningkatan kualitas barang dalam negeri berdampak pada kurangnya kemauan untuk melakukan impor serta dapat meningkatkan ekspor. Pada saat yang sama, meningkatkan kualitas barang impor dan meningkatkan kemauan masyarakat untuk melakukan impor. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan valuta asing.
2. Berubahnya harga komoditas impor dan ekspor. Barang dalam negeri yang dipasarkan dengan harga murah akan meningkatkan ekspor, dan jika harga naik, maka ekspor akan turun. Turunnya harga barang impor akan meningkatkan jumlah impor, dan naiknya harga barang impor berdampak pada pengurangan impor.
3. Naiknya harga secara umum (inflasi). Inflasi biasanya menurunkan nilai kurs.

---

<sup>60</sup> Ridwan Maronrong dan Kholik Nugroho, “*Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Harga Saham Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Otomotif Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017*”. Vol. 26 No. 2, 2017. Hal. 281.

4. Berubahnya suku bunga dan hasil investasi. Suku bunga dan hasil investasi yang rendah umumnya menyebabkan arus keluar modal domestik, di sisi lain suku bunga dan hasil investasi yang tinggi akan menyebabkan arus masuk asing.
5. Pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika kemakmuran ekonomi didorong oleh perkembangan ekspor, maka permintaan mata uang asing akan tumbuh lebih cepat daripada penawarannya, sehingga mata uang tersebut terapresiasi.

Ada dua cara dalam menentukan kurs mata uang asing, yaitu:

1. Permintaan Mata Uang Asing

Faktor penting untuk menentukan perbandingan harga barang-barang di negara lain dengan barang produksi dalam negeri adalah nilai tukar mata uang asing. Untuk menjelaskan hal ini, akan dipertimbangkan nilai tukar antara Jepang (yen) dan AS (dolar). Jika nilai mata uang dolar tinggi, misalnya nilai tukar satu dolar = 200 yen, maka barang-barang di Amerika Serikat lebih mahal. Jika penduduk Jepang ingin mengimpor barang AS ke Jepang, akan dikenakan biaya 200 yen untuk menghabiskan 1 dolar di AS, dan sebaliknya.

2. Penawaran Mata Uang Asing

Nilai tukar mata uang asing menjadi pengaruh penting dalam menentukan harga barang produksi negara lain, apakah lebih murah atau mahal. Tingginya harga suatu mata uang, akan meningkatkan penawaran mata

uang tersebut, sedangkan rendahnya harga mata uang maka sedikit penawaran pada mata uang tersebut.<sup>61</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan perbedaan nilai kurs yaitu:

1. Selisih antara kurs beli dan jual oleh pedagang valuta asing (dalam hal ini bank). Kurs beli adalah kurs yang digunakan pedagang valuta asing saat membeli mata uang asing. Sedangkan kurs jual adalah kurs yang digunakan pedagang valuta asing saat menjual valuta asing.
2. Perbedaan nilai tukar karena perbedaan waktu pembayaran. Kurs Telegraphic Transfer (TT) adalah transfer kawat (*telex*) yang memungkinkan transfer valuta asing langsung. Oleh karena itu, harga valuta asing relatif tinggi. Sedangkan Kurs Mail Transfer (MT) merupakan transaksi valuta asing dengan fasilitas surat dimana penyerahan valuta asing relatif lambat, oleh sebab itu harga valuta asing relatif lebih murah.<sup>62</sup>
3. Perbedaan tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayaran. Dalam hal ini bank asing yang terkenal (*bonafide*) nilai kursnya relatif tinggi dibandingkan dengan bank yang tidak *bonafide*.<sup>63</sup>

#### **E. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

CAR adalah rasio kinerja bank yang mengukur apakah bank memiliki modal yang cukup untuk mendukung aset yang menimbulkan risiko, seperti pembiayaan yang diberikan oleh bank.<sup>64</sup> Menurut Dendawijaya:

---

<sup>61</sup> Husna Ni'matul Ulya, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional dan Islam*, hal. 250.

<sup>62</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 118.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 119.

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dan lain-lain.<sup>65</sup>

CAR merupakan ukuran yang bertujuan menentukan rasio kecukupan modal suatu bank pada saat bank mengalami *shock*. Tidak ada nilai modal yang cukup guna mengatasi masalah permodalan, namun pemerintah lebih menyarankan bank mempunyai lebih banyak modal daripada jumlah minimum yang ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk memitigasi tingkat risiko kegagalan bank.<sup>66</sup> Dalam kegiatan perbankan syariah, modal harus bebas dari unsur riba sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

Artinya:

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Rasio kecukupan modal dijadikan tolak ukur kemampuan bank dalam menutup turunnya aset yang diakibatkan kerugian bank dari aset berisiko. CAR didasarkan pada prinsip yaitu setiap investasi yang memiliki risiko wajib menyediakan modal yang setara dengan persentase dari total investasi. Semakin tinggi rasio, maka akan semakin baik pula posisi modal bank.

---

<sup>64</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia". Vol. 4 No. 3, 2018. Hal. 151.

<sup>65</sup> Nidia Anggreni Das, dkk., "The Influence of CAR, NPF, FDR, and BOPO to Return on Asset in Indonesia Islamic Bank on the Indonesian Stock Exchange". Vol. 8 No. 4, 2020. Hal. 421.

<sup>66</sup> Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hal. 10.

Menurut standar yang dikeluarkan Bank for International Settlements (BIS), semua bank di Indonesia wajib menyediakan setidaknya 8% dari modal dalam Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).<sup>67</sup> Aset yang dihitung disini mengacu pada aset neraca dan aset administratif. Untuk setiap aset, bobot risiko ditentukan, yang jumlahnya tergantung pada tingkat risiko yang ada dalam aset itu sendiri, atau pada klasifikasi klien, penjamin, atau sifat agunan. ATMR suatu aset neraca adalah nilai nominal suatu pos neraca dikalikan dengan bobot risikonya.

Misalnya Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) Rp1 miliar dengan bobot risiko 50% dan ATMR Rp500 juta. ATMR aset administratif diperoleh dengan mengalikan nilai nominal dengan bobot risiko aset administratif.<sup>68</sup> Berdasarkan SE BI Nomor 12/11/DPNP per 31 Maret 2010, rasio CAR dapat dihitung sebagai berikut:<sup>69</sup>

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Modal terbagi atas modal inti dan modal pelengkap:

1. Modal inti (*tier 1*), meliputi agio saham, modal disetor, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan dan sebagian kekayaan bersih anak perusahaan dalam laporan keuangan dikonsolidasikan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia", hal. 151.

<sup>68</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Implementasi)*, hal. 167.

<sup>69</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia", hal. 151.

<sup>70</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Implementasi)*, hal. 168.

2. Modal pelengkap (*tier 2*), termasuk cadangan yang dibentuk dari laba bukan setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya sama dengan modal.<sup>71</sup>
3. Modal pelengkap (*tier 3*) adalah sub-investasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia.<sup>72</sup>

ATMR adalah penyebut CAR, sedangkan modal berlaku sebagai pembilang yang menghitung kemampuan modal untuk memenuhi risiko aset. Ketika meninjau Aset Tertimbang Menurut Risiko bank syariah, pertama-tama wajib mengetahui bahwa aset perbankan syariah dapat dibagi menjadi:

1. Aktiva yang dibiayai dengan modal bebas dan/atau kewajiban (*wadiah* atau *qard*).
2. Aktiva yang dibiayai oleh rekening investasi bagi hasil (*profit and loss sharing investment account*) yaitu *mudharabah* (baik *general investment account/mudharabah mutlaqah* yang tercatat pada neraca/*on balance sheet* maupun *restricted investment account/mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administratif/*off balance sheet*).<sup>73</sup>

Klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia dinyatakan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penetapan Tingkat CAR**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$CAR \geq 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang sehat	$6\% < CAR < 8\%$
5	Tidak sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber: Lampiran SEBI No. 9/24/DPbs Tahun 2007.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 169.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 171.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 172.

## F. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR merupakan rasio antara total seluruh pembiayaan yang dikeluarkan bank terhadap dana yang diperoleh bank.<sup>74</sup> Menurut Antonio, “FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.”<sup>75</sup> Menurut Kasmir, “FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.”

Menurut Ongore dan Kusa “FDR adalah risiko likuiditas sebuah bank yang merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Likuiditas menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajibannya pada nasabah.”<sup>76</sup> Dari pendapat para ahli dapat dinyatakan bahwa definisi FDR adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah untuk membayar kembali penarikan nasabah.<sup>77</sup> Landasan syariah mengenai pembiayaan terdapat pada QS. Al-Baqarah: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ  
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya:

<sup>74</sup> Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, “Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Vol. 2 No. 1, 2018. Hal. 3.

<sup>75</sup> Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Vol. 4 No. 2, 2019. Hal. 63.

<sup>76</sup> Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia*, hal. 9.

<sup>77</sup> Aditya Achmad Fathony, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return on Assets (ROA) pada PT BPRS Amanah Rabbaniyah Periode 2015-2018”. Vol. 12 No. 1, 2021. Hal.67.

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.*

Berikut rumus FDR:<sup>78</sup>

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Rasio FDR yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik kemampuan bank tersebut, yang berarti bank tersebut dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi manajemen. Sebaliknya, jika rasionya rendah berarti bank tersebut tidak mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Namun, rasio FDR yang lebih tinggi juga memperlihatkan bahwa tingkat likuiditas perbankan mengalami penurunan karena lebih banyak dana yang digunakan untuk pinjaman atau pembiayaan. Pada saat yang sama, semakin rendah rasionya, semakin kuat likuiditas bank.

Di balik itu kondisi bank yang semakin likuid menggambarkan semakin banyak dana yang membeku, dan karena fungsi intermediasi belum dijalankan dengan baik, maka peluang bank untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar semakin kecil. Oleh sebab itu, bank dituntut agar mampu mengatur dananya dengan lebih mengoptimalkan penempatan dana yang bertujuan

---

<sup>78</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia", hal. 150.

untuk menjaga posisi likuiditas bank. Sesuai ketentuan Bank Indonesia standar FDR adalah 80%-100%. Oleh karena itu, rasio FDR perlu diperhatikan supaya nilainya tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah.<sup>79</sup> Klasifikasi tingkat FDR menurut Bank Indonesia yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penetapan Tingkat FDR**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$50\% < \text{FDR} < 75\%$
2	Sehat	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
3	Cukup sehat	$85\% \leq \text{FDR} \leq 100\%$
4	Kurang sehat	$100\% \leq \text{FDR} \leq 120\%$
5	Tidak sehat	$\text{FDR} \geq 120\%$

Sumber: Lampiran SEBI No. 9/24/DPbs Tahun 2007.

#### **G. Non Performing Financing (NPF)**

NPF berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, “NPF adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman.”<sup>80</sup> NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah diedarkan oleh bank. Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah dalam kegiatan perbankan adalah pembiayaan yang mempunyai kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah bank perlu menerapkan aspek kehati-hatian.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, hal. 62.

<sup>80</sup> Sri Wahyuni Asnaini, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Vol. 5 No. 2, 2014. Hal. 268.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 265.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 49 mengatakan kehati-hatian adalah bagian dari peringatan.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

Tingkat NPF yang tinggi berpengaruh terhadap pembentukan penyisihan kerugian (PPAP), mengurangi laba usaha dan membentuk tambahan modal di bawahnya. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK), dana bagi hasil mereka dirugikan, sehingga mereka dapat mengalihkan dananya ke bank lain atau berpindah ke investasi lain yang menghasilkan untung lebih banyak.<sup>82</sup> Rasio NPF dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Rendahnya nilai NPF berarti semakin tingginya kualitas pembiayaan bank syariah, dan risiko kredit yang diambil oleh bank akan semakin kecil. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas bank syariah. Sedangkan, tingginya nilai NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin rendah, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah

---

<sup>82</sup> Wulandari Kuswaharini, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia". Vol. 6 No. 1, 2020. Hal. 27.

kredit bermasalah. Hal tersebut berakibat terhadap penurunan laba bank syariah karena dana tidak bisa diperoleh kembali dan bank tidak mampu membiayai aset produktif lainnya. Jika pendapatan bank menurun, begitu juga profitabilitasnya.<sup>83</sup>

Kelangsungan usaha bank berhubungan erat dengan aset yang menguntungkan, sehingga mengharuskan manajemen bank agar dapat mengamati dan menganalisis kualitas aset produktifnya setiap saat. Kualitas aset produktif mengacu pada kualitas aset yang terkait dengan risiko kredit yang harus dihadapi bank untuk memberikan kredit dan berinvestasi dalam pembiayaan perbankan. Aktiva produktif yang dinilai kualitasnya antara lain penanaman dana dalam rupiah maupun valuta asing.<sup>84</sup> Berikut ini klasifikasi tingkat NPF menurut Bank Indonesia:

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penetapan Tingkat NPF**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF \leq 5\%$
4	Cukup baik	$5\% \leq NPF \leq 8\%$
5	Kurang baik	$8\% \leq NPF \leq 12\%$
6	Buruk	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Lampiran SEBI No. 9/24/DPbs Tahun 2007.

## H. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

<sup>83</sup> Alif Rana Fadhilah dan Noven Suprayogi, “Pengaruh FDR, NPF, dan BOPO terhadap Return to Asset pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Vol. 6 No. 12, 2019. Hal. 2373.

<sup>84</sup> Danny Syachreza dan Rini Gusliana, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Bank Size, BOPO terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia”. Vol. 17 No. 1, 2020. Hal. 27.

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>85</sup> Sistem operasional perbankan dalam sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan bank syariah agar melakukan fungsi sosial yaitu dengan melakukan fungsi seperti lembaga *baitul maal*, yang bertugas menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan mengarahkannya ke basis pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai keinginan *wakif*.<sup>86</sup>

Landasan dasar bank syariah QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata*

<sup>85</sup> Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), hal. 25.

<sup>86</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Implementasi)*, hal. 24.

*(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Sistem operasi bank syariah mempunyai perbedaan dengan bank konvensional. Pada bank syariah layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya merupakan layanan tanpa bunga. Dalam sistem operasi bank syariah, segala bentuk transaksi tidak diperbolehkan menerapkan bunga. Baik yang diperoleh dari peminjam maupun dana yang dibayarkan kepada penyimpan dana, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga.<sup>87</sup>

Adapun asas dan landasan hukum perbankan syariah antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terdapat beberapa perubahan di dalam UU tersebut, yang memberikan kesempatan lebih bagi pengembangan bank syariah. Berdasarkan UU tersebut, disebutkan bahwa tujuan dikembangkannya sistem perbankan syariah adalah:
  - a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>88</sup> Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 28.

- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
  - c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
4. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU ini, antara lain yakni menyangkut pemisahan UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.
  5. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/10/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
  6. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Prinduk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  7. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
  8. PBI No. 10/23/PBI/2008 perubahan kedua atas PBI No.6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
  9. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

10. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.<sup>89</sup>

Tiga fungsi perbankan syariah yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan maupun investasi. Fungsi kedua yaitu sebagai penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan fungsi yang ketiga yaitu memberikan pelayanan perbankan.

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah sebagai penghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana. Dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *al-wadiah* dalam menerima dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan. Dalam menerima dana masyarakat dalam bentuk investasi, perbankan syariah menggunakan akad *al-mudharabah*.<sup>90</sup>

2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana kepada Masyarakat

Fungsi kedua bank syariah yaitu sebagai penyalur dengan memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam mengajukan pembiayaan, masyarakat harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank syariah. Pembiayaan akan diberikan apabila persyaratan telah terpenuhi. Bagi bank syariah, mengalokasikan dana merupakan suatu hal yang penting. Dari pengalokasian dana tersebut, bank syariah akan mendapat imbalan. Setiap

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 29.

<sup>90</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Implementasi)*, hal. 28.

*return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah berbeda-beda, tergantung akad yang digunakan.<sup>91</sup>

### 3. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Selain sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, bank syariah juga mempunyai fungsi yaitu sebagai pemberi layanan jasa kepada nasabahnya. Melayani nasabah merupakan fungsi ketiga dari perbankan syariah. Layanan perbankan syariah tersebut diberikan guna mencukupi kebutuhan nasabah dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai produk layanan yang dapat disediakan oleh bank syariah antara lain layanan pengiriman uang (*transfer*), pembukuan, penagihan surat berharga, dan lain-lain.<sup>92</sup>

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, diantaranya:

1. Penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syariah.
2. Penghimpunan dana dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk investasi lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
3. Mengalokasikan pembiayaan bagi hasil sesuai akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 30.

4. Mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.
5. Mengalokasikan dana sesuai dengan akad *qardh* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah.
6. Mengalokasikan pembiayaan barang bergerak atau tidak bergerak yang disewakan kepada nasabah sesuai dengan akad *ijarah* dan/atau dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
7. Mengambil alih hutang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau pembiayaan sesuai dengan syariah.<sup>93</sup>
9. Membeli, menjual atau menjamin surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan dengan transaksi yang bonafid berdasarkan prinsip syariah (seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*) atas risiko sendiri.
10. Pembelian surat berharga sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 52.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 53

## I. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggali data penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya.

Penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Herni Hernawati dan Oktaviani Rita Puspasari (2018) <sup>95</sup>	Pengaruh Faktor Makro ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah	Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF, sedangkan BI Rate dan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.	Menggunakan variabel independen inflasi dan kurs, serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan lima bank umum syariah, serta pada variabel independen terdapat penambahan variabel BI Rate, dan periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2010-2016.
2	Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo (2019) <sup>96</sup>	Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia	Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. CAR dan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. BOPO	Menggunakan variabel independen CAR, PDRB, dan inflasi serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, serta pada variabel independen terdapat penambahan variabel ROA, BOPO, total aset, BI Rate, pengangguran, dan periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2013-2017.

<sup>95</sup> Herni Hernawati, "Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah". Vol. 1 No. 1, 2018. Hal. 29-44.

<sup>96</sup> Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia". Vol. 5 No. 1, 2019. Hal. 42-49.

			memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. Sementara itu makro ekonomi BI <i>Rate</i> dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. Sementara variabel Inflasi dan pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia.		
3	Amir Hamzah (2018) <sup>97</sup>	Pengaruh Faktor Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017)	Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF, sedangkan BI <i>Rate</i> dan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.	Menggunakan variabel independen inflasi dan kurs, serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan lima bank umum syariah, serta pada variabel independen terdapat penambahan variabel BI <i>Rate</i> , dan periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2010-2017.
4	Indri Supriani dan Heri	Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro terhadap	CAR berpengaruh negatif tidak signifikan	Menggunakan variabel independen CAR, FDR, inflasi	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan

<sup>97</sup> Amir Hamzah, “Pengaruh Faktor Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017)”, hal. 73-90.

	Sudarsono (2018) <sup>98</sup>	NPF Perbankan Syariah di Indonesia	terhadap NPF, variabel FDR, ROA, BOPO dan BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap variabel NPF, sedangkan variabel inflasi dan kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.	dan kurs serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda.	perbankan syariah di Indonesia, serta pada variabel independen terdapat penambahan variabel ROA, BOPO, BI Rate, dan periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2010-2017.
5	Annisa Siti Fathonah dan Dadang Hermawan (2020) <sup>99</sup>	Estimasi Pengaruh Faktor Internal Bank dan Stabilitas Makro ekonomi terhadap Profitabilitas dengan Mediasi Rasio Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia	Secara simultan diketahui bahwa variabel modal, BOPO, FDR, inflasi, dan GDP bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap NPF pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan pengaruh terhadap ROA, variabel modal, BOPO, FDR, inflasi, GDP, dan NPF bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia.	Menggunakan variabel independen FDR, inflasi, dan GDP, serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda. Selain itu, objek penelitian juga sama-sama pada PT Bank Muamalat Indonesia.	Perbedaannya terdapat pada variabel independen terdapat penambahan variabel BOPO dan modal, serta periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2008-2018.

<sup>98</sup> Indri Supriani dan Heri Sudarsono, “Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia”, hal. 1-18.

<sup>99</sup> Annisa Siti Fathonah dan Dadang Hermawan, “Estimasi Pengaruh Faktor Internal Bank dan Stabilitas Makroekonomi terhadap Profitabilitas dengan Mediasi Rasio Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia”. Vol. 3 No. 2, 2020. Hal. 93-108.

6	Najiatun, dkk (2019) <sup>100</sup>	Analisis Variabel Makro ekonomi terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia	BI Rate berpengaruh positif signifikan, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan, sementara variabel kurs berpengaruh positif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.	Menggunakan variabel independen inflasi dan kurs serta variabel dependen yaitu NPF.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan perbankan syariah di Indonesia, serta pada variabel independen terdapat penambahan variabel BI Rate, dan periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2008-2019. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu metode VAR ( <i>Vector Auto Regression</i> ) atau VECM ( <i>Vector Error Correction Model</i> ).
7	Fadilla Muhammad Mahdi (2019) <sup>101</sup>	Pengaruh Instabilitas Makro ekonomi terhadap <i>Non-Performing Financing</i> Perbankan Syariah di Indonesia	Inflasi secara signifikan mempengaruhi tren NPF, sementara faktor lain tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap NPF perbankan syariah Indonesia.	Menggunakan variabel independen inflasi dan PDB serta variabel dependen yaitu NPF.	Perbedaannya terdapat pada variabel independen terdapat penambahan variabel suku bunga Bank Indonesia, dan periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2008-2019. Metode yang digunakan juga berbeda yaitu metode VECM ( <i>Vector Error Correction Model</i> ).
8	Dinnul Alfian Akbar (2016) <sup>102</sup>	Inflasi, <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Finance to Deposit Ratio</i>	Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. GDP, CAR, FDR berpengaruh negatif	Menggunakan variabel independen, inflasi, GDP, CAR, dan FDR, serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan enam bank umum syariah di Indonesia. Periode yang digunakan juga

<sup>100</sup> Najiatun, dkk, "Analisis Variabel Makroekonomi terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia", hal. 335-349.

<sup>101</sup> Fadilla Muhammad Mahdi, "Pengaruh Instabilitas Makroekonomi terhadap *Non-Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia". Vol. 4 No. 2, 2019. Hal. 214-226.

<sup>102</sup> Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Finance To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia", hal. 19-37.

		(FDR), terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	terhadap NPF. Inflasi, GDP, CAR, dan FDR secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap NPF.	metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda.	berbeda yaitu menggunakan periode 2010-2014.
9	Elsa Ayu Amelia (2019) <sup>103</sup>	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Inflasi, dan <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR), terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017	CAR dan inflasi berpengaruh negatif, sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap NPF.	Menggunakan variabel independen, CAR, inflasi, dan FDR, serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan tiga belas bank umum syariah di Indonesia. Periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2015-2017.
10	Iin Emy Prastiwi (2021) <sup>104</sup>	Analisis Kondisi Makro Ekonomi dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah	Kurs dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan inflasi dan suku bunga <i>BI Rate</i> tidak berpengaruh signifikan.	Menggunakan variabel independen inflasi, dan kurs, serta variabel dependen yaitu NPF. Kemudian metode yang digunakan juga sama yaitu metode regresi linier berganda.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu menggunakan perbankan syariah di Indonesia. Periode yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan periode 2014-2018.

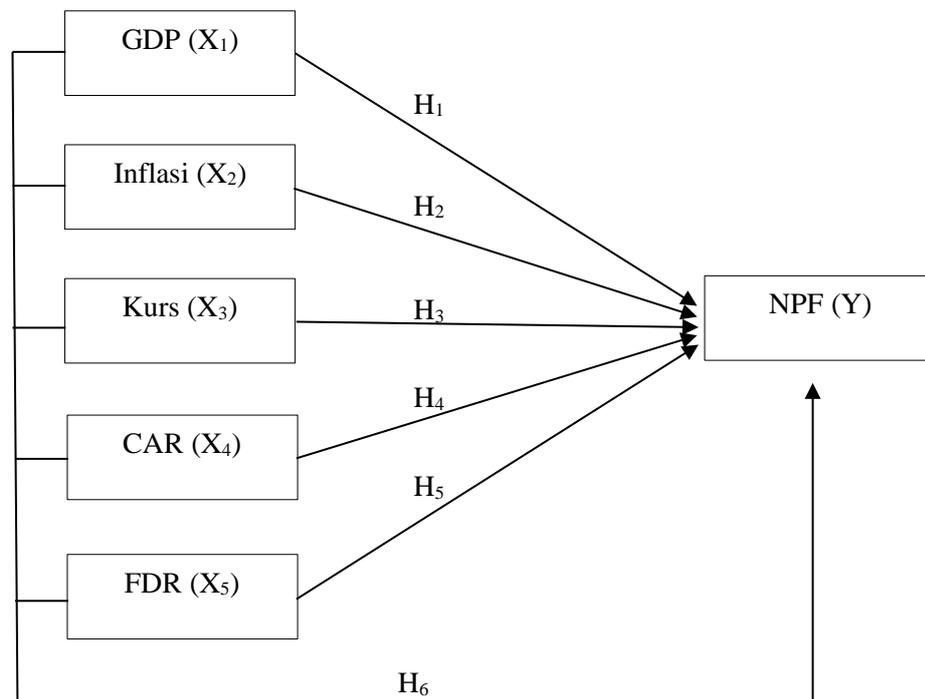
<sup>103</sup> Elsa Ayu Amelia, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Inflasi, dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR), terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017”. Vol. 8 No. 1, 2019. Hal. 11-18.

<sup>104</sup> Iin Emy Prastiwi, “Analisis Kondisi Makro Ekonomi dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah”. Vol. 4 No. 1, 2021. Hal. 68-75.

## J. Kerangka Konseptual

Dilihat dari landasan teori serta penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1. Pengaruh variabel GDP (X<sub>1</sub>) terhadap NPF (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Rindang<sup>105</sup>.
2. Pengaruh variabel inflasi (X<sub>2</sub>) terhadap NPF (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Amir Hamzah<sup>106</sup>, Indri<sup>107</sup>, Fadilla<sup>108</sup>, dan Elsa<sup>109</sup>.

<sup>105</sup> Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal...", hal. 42-49.

<sup>106</sup> Amir Hamzah, "Pengaruh Faktor Makro Ekonomi...", hal. 73-90.

<sup>107</sup> Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro...", hal. 1-18.

<sup>108</sup> Fadilla Muhammad Mahdi, "Pengaruh Instabilitas Makroekonomi...", hal. 214-226.

<sup>109</sup> Elsa Ayu Amelia, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi...", hal. 11-18.

3. Pengaruh variabel kurs ( $X_3$ ) terhadap NPF (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Herni<sup>110</sup>, Amir Hamzah<sup>111</sup>, Indri<sup>112</sup>, dan Iin Emy<sup>113</sup>.
4. Pengaruh variabel CAR ( $X_4$ ) terhadap NPF (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Indri<sup>114</sup>, Dinnul<sup>115</sup>, Elsa<sup>116</sup>, dan Rindang<sup>117</sup>.
5. Pengaruh variabel FDR ( $X_5$ ) terhadap NPF (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Indri<sup>118</sup>, Dinnul<sup>119</sup>, dan Elsa<sup>120</sup>.
6. Pengaruh GDP ( $X_1$ ), inflasi ( $X_2$ ), kurs ( $X_3$ ), CAR ( $X_4$ ), dan FDR ( $X_5$ ) secara bersama-sama terhadap NPF (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Dinnul<sup>121</sup> dan Annisa<sup>122</sup>.

## K. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang dipaparkan di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh GDP terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ( $X_1$ )

$H_0$  : GDP tidak berpengaruh terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

<sup>110</sup> Herni Hernawati, "Pengaruh Faktor Makroekonomi...", hal. 29-44.

<sup>111</sup> Amir Hamzah, "Pengaruh Faktor Makro Ekonomi...", hal. 73-90.

<sup>112</sup> Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro ...", hal. 1-18.

<sup>113</sup> Iin Emy Prastiwi, "Analisis Kondisi Makro Ekonomi...", hal. 68-75.

<sup>114</sup> Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro...", hal. 1-18.

<sup>115</sup> Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, Gross Domestic Product (GDP)...", hal. 19-37.

<sup>116</sup> Elsa Ayu Amelia, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi...", hal. 11-18.

<sup>117</sup> Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal...", hal. 42-49.

<sup>118</sup> Indri Supriani dan Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Variabel Mikro ...", hal. 1-18.

<sup>119</sup> Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, Gross Domestic Product (GDP)...", hal. 19-37.

<sup>120</sup> Elsa Ayu Amelia, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi...", hal. 11-18.

<sup>121</sup> Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, Gross Domestic Product (GDP)...", hal. 19-37.

<sup>122</sup> Annisa Siti Fathonah dan Dadang Hermawan, "Estimasi Pengaruh Faktor Internal Bank...", hal. 93-108.

- $H_1$  : GDP berpengaruh signifikan terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Pengaruh inflasi terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ( $X_2$ )
- $H_0$  : Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- $H_1$  : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
3. Pengaruh kurs terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ( $X_3$ )
- $H_0$  : Kurs tidak berpengaruh terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- $H_1$  : Kurs berpengaruh signifikan terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
4. Pengaruh CAR terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ( $X_4$ )
- $H_0$  : CAR tidak berpengaruh terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- $H_1$  : CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
5. Pengaruh FDR terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ( $X_5$ )
- $H_0$  : FDR tidak berpengaruh terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- $H_1$  : FDR berpengaruh signifikan terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

6. Pengaruh GDP ( $X_1$ ), inflasi ( $X_2$ ), kurs ( $X_3$ ), CAR ( $X_4$ ), dan FDR ( $X_5$ ) secara bersama-sama terhadap NPF PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ( $X_5$ )

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel GDP, inflasi, kurs, CAR, dan FDR terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia Tbk.

$H_1$  : Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel GDP, inflasi, kurs, CAR, dan FDR terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia Tbk.